

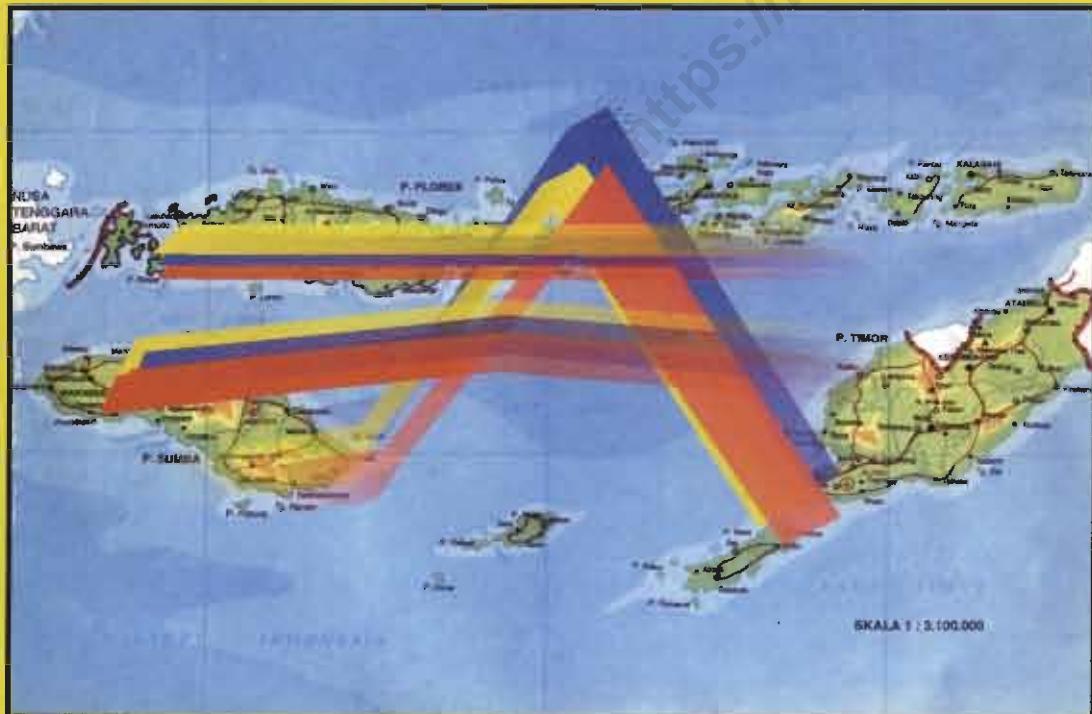


Katalog BPS : 7414.53

STATISTIK KEUANGAN DAERAH (Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II) NUSA TENGGARA TIMUR

*Local Financial Statistics
Nusa Tenggara Timur*

2001



BPS BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

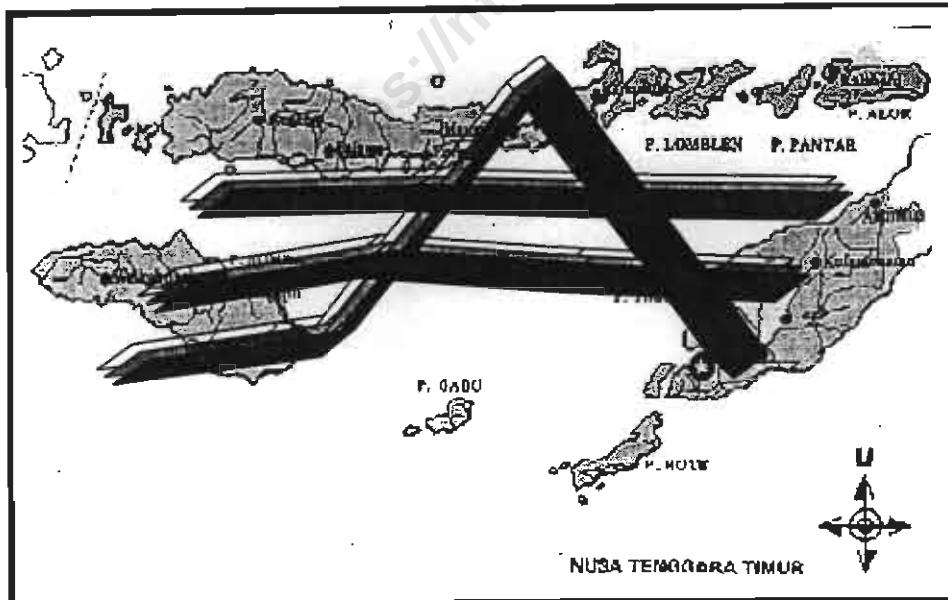


Katalog BPS : 7414.53

STATISTIK KEUANGAN DAERAH (Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II) NUSA TENGGARA TIMUR

*Local Financial Statistics
Nusa Tenggara Timur*

2001



BPS BADAN PUSAT STATISTIK PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

STATISTIK KEUANGAN DAERAH 2001

(Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II)

NUSA TENGGARA TIMUR

LOCAL FINANCIAL STATISTICS 2001

NUSA TENGGARA TIMUR

Katalog BPS : 7414.53

No. Publikasi / Publication Number : 53542.9902

Ukuran Buku / Book Size : 21 cm x 28 cm

Jumlah Halaman / Total pages : 73

Naskah / Manuscript :

Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit / Cover Design :

Bidang Statistik Distribusi

Diterbitkan oleh / Published by :

Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the source

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

(Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II)

NUSA TENGGARA TIMUR

*Local Financial Statistics
Nusa Tenggara Timur*

2001

https://ntt.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Peran dari sektor pemerintah dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur selama ini cukup besar. Hal ini karena keberadaan sektor pemerintah terutama sebagai penggerak dan penunjang dari sektor-sektor ekonomi lainnya di Nusa Tenggara Timur.

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Nusa Tenggara Timur 2001 ini memuat data realisasi penerimaan dan pengeluaran dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang ada di Nusa Tenggara Timur dalam series tahun 1997/1998 s/d tahun 2000. Publikasi ini disajikan untuk memberikan gambaran sejauh mana realisasi keuangan Pemerintah Daerah baik Tingkat I maupun Tingkat II sehingga dapat dilihat potensi daerah yang bisa dipakai sebagai bahan kajian untuk membuat kebijaksanaan umum yang rinci dan tepat waktu.

Pada kesempatan ini kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga publikasi ini dapat disajikan. Segala kritik dan saran demi penyempurnaan publikasi ini sangat diharapkan.

Kupang, Oktober 2002
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Drs. H. O. Simanjuntak
NIP. 340003528

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v - vi
PENJELASAN UMUM	1
I. Pendahuluan	1
II. Kegunaan Data	2
III. Cakupan dan Liputan	2
IV. Metode Pengumpulan Data	2
V. Konsep dan Definisi	3
ULASAN SINGKAT.....	8
I. Penerimaan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur	8
a. Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I	8
b. Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat II	10
II. Pengeluaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur	12
a. Pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat I	12
b. Pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat II	14

Tabel-Tabel

Tabel a.	Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur 1997/1998 - 2000	9
Tabel b.	Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur 1997/1998 - 2000	11
Tabel c.	Pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur 1997/1998 - 2000	13
Tabel d.	Pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur 1997/1998 - 2000	15
Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur 1997/1998 - 2000	17
Tabel 1.2	Realisasi Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur 1997/1998 - 2000	18
Tabel 1.3	Realisasi Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur 1997/1998 - 2000	19
Tabel 2.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur 1997/1998 - 2000	20

Tabel 2.2	Realisasi Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur 1997/1998 - 2000	21
Tabel 2.3	Realisasi Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur 1997/1998 - 2000	22
Tabel 2.4	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur 1999/2000	23 - 26
Tabel 2.4.1-2.4.13	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat II masing-masing Kabupaten 1997/1998 - 2000	27 - 39
Tabel 2.5	Realisasi Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur 1999/2000	40 - 43
Tabel 2.5.1-2.5.13	Realisasi Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah Tingkat II masing-masing Kabupaten 1997/1998 - 2000	44 - 56
Tabel 2.6	Realisasi Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur 1999/2000	57 - 60
Tabel 2.6.1-2.6.13	Realisasi Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah Tingkat II masing-masing Kabupaten 1997/1998 - 2000	61 - 73

Statistik Keuangan Daerah
Nusa Tenggara Timur
2001

Penjelasan Umum

https://ntt.go.id

PENJELASAN UMUM

I. Pendahuluan

Keadaan sosial politik bangsa Indonesia Pasca ORBA terus mengalami guncangan serius. Seiring dengan itu keadaan ekonomi kita terus merosot. Gejolak sosial dan politik yang terjadi di Aceh, Irian, Bali dan Jakarta adalah salah satu pemicu dari ketidakstabilan/kemerosotan keadaan ekonomi kita, disamping faktor lainnya seperti tertundanya bantuan IMF terhadap Indonesia, dll.

Dampak dari keadaan tersebut mempengaruhi langsung kehidupan masyarakat Indonesia . seperti pada Mei 1998 dimana rupiah mencapai angka diatas Rp.10 000 / US \$, keadaan ini berjalan terus sampai pada awal Maret 2001 rupiah merosot dengan angka diatas Rp 10 000 / US \$. Hal ini mengakibatkan berbagai kebutuhan hidup masyarakat harus dibayar dengan mahal, khususnya barang-barang yang bahan bakunya di import dari Luar Negeri.

Dengan kemampuan penerimaan keuangan Negara yang terbatas akibat krisis sejak medio 1997 sampai dengan sekarang dimana banyak perusahaan yang bangkrut sangat mempengaruhi keadaan Keuangan Pemerintah Pusat khususnya dari sektor pajak dan lain-lain dan ini juga berdampak pada Keuangan Pemerintah Daerah, khususnya Daerah - Daerah yang ketergantungannya sangat tinggi terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah.

Dengan diberlakukan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sejak Januari 2000, diharapkan Pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur dapat membiayai seluruh kegiatan pemerintahannya dengan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah (PAD) masing-masing daerah

Pada tahun 2000 Nusa Tenggara Timur mengalami pertumbuhan sebesar 4,17 persen dengan peran sektor pertanian sekitar 43.36 persen saat mana subsektor pemerintahan memberikan kontribusi sekitar 15.39 persen sehingga apabila terjadi

perubahan yang besar di sektor ini dapat pula mempengaruhi gerakan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur.

II. Kegunaan Data

Beberapa kegunaan dari Statistik Keuangan Daerah, adalah :

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi anggaran dan belanja Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerinah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Desa Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Memberikan gambaran potensi dan peranan sumber dana dan partisipasi pemerintah maupun masyarakat/swasta dalam pembangunan daerah.
- c. Sebagai bahan untuk penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional seperti penghitungan PDRB dan PDB, tabel input output dan neraca arus dana.
- d. Memberikan informasi kepada Pemerintah yang lebih tinggi untuk menentukan kebijakan pembangunan untuk masing-masing daerah.

III. Cakupan dan Liputan

Statistik Keuangan Daerah mencakup :

- a. Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I
- b. Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II

Data yang diliput dalam publikasi Statistik Keuangan Daerah ini adalah data penerimaan dan pengeluaran (rutin dan pembangunan) Pemerintah Daerah baik Tingkat I, II maupun Desa. Kelompok utama realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemda Tingkat I hampir sama dengan Tingkat II.

IV. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Statistik Keuangan Daerah, adalah dengan cara mengirimkan kuesioner atau mendatangi sumber data.

Ada 3 macam daftar isian yang digunakan, yaitu :

- a. **Model K1**, untuk mencatat realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat I, yang bersumber dari Biro Keuangan pada Setwilda Tingkat I Nusa Tenggara Timur .
- b. **Model K2**, untuk mencatat realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat II, yang bersumber dari Bagian Keuangan pada Setwilda Tingkat II Se-Nusa Tenggara Timur .

V. Konsep dan Definisi

a. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I / II

Penerimaan Pemerintah daerah Tingkat I dan II bersumber antara lain dari :

1. Bagian sisa lebih perhitungan tahun anggaran yang lalu

Adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu yang digunakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

2. Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembayaran.

Penerimaan ini bersumber antara lain dari : pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan penerimaan lain-lain.

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua tahapan yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah, antara lain : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak lainnya..

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran, pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan dari usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Termasuk di sini adalah retribusi jasa umum seperti : retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pengujian kendaraan bermotor dll, Retribusi jasa usaha seperti : retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat rekreasi dan olahraga dll, Retribusi perisinan tertentu seperti retribusi isin trayek, retribusi isin peruntukan penggunaan tanah dll.

Bagiab Laba Usaha Daerah seperti penerimaan dari Bank Pembangunan Daerah, PDAM, perusahaan daerah lainnya, penyertaan modal daerah kepada perusahaan, dll

Penerimaan Lain-lain, terdiri dari hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, dll.

3. Bagian Pendpt yg Berasal dari Pemb Pemerintah & atau Instansi yang lebih tinggi

Bagian bagi hasil pajak adalah merupakan komponen dari bagi hasil pajak dan bukan pajak yang hasilnya dibagikan kepada pemerintah daerah dengan komposisi-komposisi tertentu.

Bagian bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan bagi hasil pajak lainnya.

Penerimaan dari bagi hasil bukan pajak terdiri dari Iuran Hasil Hutan (IHH), Iuran Hasil Pengusahaan Hutan (IHPH), pemberian hak atas tanah negara, bagi hasil landrent, penerimaan dari iuran eksplorasi dan lain-lain.

Subsidi Daerah Otonom, terdiri dari subsidi belanja pegawai, subsidi belanja non pegawai dan sumbangan lainnya dari pemerintah.

Bantuan Pembangunan, terdiri dari bantuan pembangunan dati I dan bantuan lainnya.

Penerimaan Lainnya, terdiri dari penerimaan lainnya dari pemerintah pusat, penerimaan lainnya dari instasi pusat, dll

4. Pinjaman Pemerintah Daerah

Adalah pendapatan daerah yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat , pinjaman dari lembaga keuangan dalam negeri, pinjaman dari luar negeri,dll.

b. Realisasi Pengeluaran pemerintah daerah otonom Tkt I dan II

Pengeluaran Pemerintah Daerah terdiri dari dua jenis yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin terdiri dari sembilan komponen pengeluaran diantaranya adalah belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan dan lainnya. Pengeluaran rutin tidak hanya digunakan untuk pembiayaan aparatur pemerintah. tetapi juga menampung pengeluaran untuk subsidi kepada daerah otonom. untuk membantu pemerintah daerah, membiayai kegiatan operasional pemerintah dan pelaksanaan program-program pemerintah yang dilakukan di daerah.

Belanja Pegawai adalah semua pembayaran berupa uang tunai yang dibayarkan kepada pegawai daerah otonom. Belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya. tunjangan beras, honorarium, uang lembur, upah pegawai harian tetap, biaya pengobatan dan perawatan pegawai, dan belanja pegawai lain-lain.

Belanja Barang. antara lain : ongkos kantor, pembelian inventaris kantor, biaya pendidikan, biaya perpustakaan, biaya hansip, biaya pakaian dinas, pembelian peralatan dokter, pembelian alat-alat perlengkapan laboratorium, pembelian inventaris ruangan pasien, pembelian perlengkapan dapur rumah

sakit. pembelian obat-obatan, pembelian bahan laboratorium, pembelian bahan percontohan, dll.

Biaya Pemeliharaan, antara lain : biaya pemeliharaan gedung kantor, biaya pemeliharaan rumah dinas, asrama, mess, dan sebagainya, biaya pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah (KDH), biaya pemeliharaan kendaraan dinas wakil KDH, biaya pemeliharaan kendaraan dinas lainnya, biaya pemeliharaan inventaris kantor, dll.

Biaya Perjalanan Dinas, terdiri dari : biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas tetap, biaya perjalanan dinas pindah, biaya pemulangan pegawai yang dipensiunkan, biaya perjalanan dinas lainnya.

Belanja Lain-lain, antara lain : uang perangsang dan insentif, biaya penguburan pasien yang tidak mampu, biaya observasi dan penyuluhan sosial, biaya operasional, biaya propaganda penerangan dan pameran serta dokumentasi, biaya penyelenggaraan pembibitan, biaya SSB dan telekomunikasi, ongkos pengangkutan barang, sewa gudang, kesejahteraan pegawai dan lain sebagainya.

Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga, adalah pembayaran pinjaman dan bunga baik secara cicilan maupun keseluruhan. Terdiri dari : angsuran hutang, bunga hutang, bea/ongkos berhubungan dengan pinjaman dan angsuran pinjaman lainnya.

Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan kepada daerah bawahannya, terdiri dari: ganjaran kepada daerah bawahannya, subsidi kepada daerah bawahannya, sumbangan kepada daerah bawahannya, bagi hasil PKB dan BBNKB kepada daerah Tkt II , penyisihan PBB daerah Tkt I kepada desa, dll.

Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, terdiri dari : bantuan untuk instansi vertikal Depdagri (pembangunan desa, sospol, agraria, dll.); bantuan untuk kepada instansi vertikal lainnya (PTN dan pendidikan lainnya, RRI, TVRI, PFN, dll.); bantuan untuk Parpol ; bantuan untuk organisasi profesi (PWI, KONI, MUI, KNPI, Pramuka, MTQ, lembaga ibadah, biro konsultasi

dan bantuan hukum, PEPABRI, dsb.); bantuan untuk Organisasi Sosial (yayasan yatim piatu, yayasan cacat veteran, PMI, dll.); dan lain-lain.

Pengeluaran tidak tersangka, adalah semua pengeluaran/belanja yang tidak terduga pada tahun anggaran yang diteliti.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran Pembangunan, adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses pembangunan. sebagai kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pembangunan terdiri dari 21 jenis pengeluaran yang berorientasi ke 20 jenis sektor pembangunan dan subsidi pembangunan kepada daerah bawahan, antara lain : sektor industri, sektor pertanian dan kehutanan, sumber daya air dan irigasi, sektor tenaga kerja, sektor perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan daerah dan koperasi, sektor transportasi, sektor pertambangan dan energi, sektor pariwisata dan telekomunikasi daerah, sektor pembangunan daerah dan pemukiman, lingkungan hidup dan tata ruang , dan lain-lain.

Statistik Keuangan Dearah
Nusa Tenggara Timur
2001

Ulasan Singkat

https://nnt.bps.go.id

ULASAN SINGKAT

Dalam GBHN disebutkan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Untuk membiayai pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana untuk pembangunan daerah diharapkan digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian tetapi melihat kemampuan setiap daerah tidak sama, maka sumber lain yang membantu membiayai roda pemerintahan dan pembangunan di daerah juga berasal dari subsidi daerah otonom dan bantuan pembangunan. Nampaknya Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kelompok propinsi yang masih lebih banyak mengharapkan bantuan pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan roda pemerintahannya.

Berikut ini secara ringkas. dibahas bagaimana struktur dan pola pertumbuhan masing-masing sumber penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2000.

I. Penerimaan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur

a. Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I

Secara umum trend dari penerimaan daerah Pemda Tk. I Nusa Tenggara Timur bergerak maju dari tahun ke tahun, walaupun pada TA 2000 mengalami penurunan sebesar -4,97 % dibanding TA 1999/2000. Penurunan ini lebih disebabkan oleh anggaran yang terbatas dari pemerintah pusat karena sebagian besar APBN kita digunakan untuk membayar cicilan hutang Luar Negeri. Hal ini nampak dari bantuan pembangunan yang menurun sebesar -12,78 % dibanding tahun sebelumnya.

Selama TA 1997/1998 - 1999/2000 penerimaan Pemda Tk. I Nusa Tenggara Timur berkisar antara Rp. 138,1 milyar sampai dengan Rp. 192,9 milyar pertahun. Penerimaan sebesar itu lebih banyak disumbangkan oleh pemerintah pusat, rata-rata Rp. 107,43 milyar pertahun atau sebesar 72,52 persen dari total penerimaan PEMDA Tingkat I, Sedangkan pada Tahun Anggaran 2000 total penerimaan PEMDA Tingkat I yang disumbangkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 76,47 % mengalami kenaikan sebesar 3,95 % dibandingkan dengan rata-rata 3 tahun yang lalu. Walaupun besarnya subsidi menurun 11,5 milyar dibanding tahun yang lalu, sementara PAD pada TA 2000 hanya menyumbangkan sebesar Rp. 20.063 miliar atau sebesar 10,95 persen dari rata-rata total penerimaan tahun 2000.

Selama TA. 1997/1998 sampai dengan 1998/1999 total penerimaan pemerintah daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan sebesar -4,14 % atau menurun sebesar 5,72 miliar rupiah yakni dari 138.155 milyar menjadi 132.438 milyar.

Tabel a.

Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I
Propinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 1997/1998 - 2000

(Rp. juta)

Tahun Anggaran	PAD	Subsidi	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5
1997/1998	29 054	94 854	14 247	138 155
1998/1999	17 607	98 629	16 202	132 438
1999/2000	20 490	151 641	20 729	192 860
2000	20 063	140 142	23 067	183 272

Penurunan ini akibat dari dampak krisis moneter pada pertengahan Juni 1997. krisis melanda bangsa kita yang berdampak kepada Penerimaan Asli Daerah (PAD) Nusa Tenggara Timur TA. 1998/1999, sehingga pada tahun tersebut PAD kita mengalami penurunan sekitar 39.40 persen yakni menurun sebesar Rp. 11.447

milyar dibanding TA 1997/1998 ,setelah itu pada TA 1999/2000 keadaannya sedikit lebih baik dimana mengalami peningkatan dari Rp. 17,6 milyar menjadi Rp. 20,5 milyar. namun pada tahun anggaran 2000 PAD mengalami penurunan menjadi 20 milyar. Penurunan PAD Tingkat I ini lebih disebabkan oleh penurunan pendapatan dari retribusi daerah, laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain. Jika pada tahun anggaran 1999/2000 pendapatan yang dihasilkan dari retribusi daerah sebesar 8,1 milyar, unruk tahun anggaran 2000 menurun menjadi 5,2 milyar.

Ketergantungan Pemda Tk. I Nusa Tenggara Timur pada subsidi daerah otonom dan bantuan pembangunan dari pemerintah pusat sangat tinggi. Pada TA 1997/1998 subsidi dan bantuan pembangunan pemerintah pusat sebesar Rp. 94,85 milyar atau 68,66 persen dari total penerimaan Pemda Tk. I Nusa Tenggara Timur, dan terus mengalami kenaikan dimana pada TA 1999/2000 sumbangan dan bantuan pemerintah pusat menjadi Rp. 151,6 milyar atau 78,63 persen dari total penerimaan pada TA 2000 subsidi dan bantuan pembangunan pemerintah pusat mengalami penurunan dari 151,6 milyar menjadi 140,1 milyar. Begitu pula penerimaan dari bagi hasil pajak/bukan pajak yang setiap tahunnya selalu bergerak naik walaupun sumbangannya terhadap penerimaan Pemda Tk. I Nusa Tenggara Timur masih sangat kecil.Pada TA 2000 sumbangan dari bagi hasil pajak/bukan pajak hanya sebesar 12,60 milyar atau 6.88 % dari total penerimaam PEMDA Tingkat I.

b. Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat II

Secara total PAD Pemda Tk. II seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun demikian pula penerimaan lainnya. Sementara bantuan dan sumbangan pemerintah pusat pada TA 1998/1999 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 1997/1998. Ketergantungan penerimaan Pemda Tk. II di Nusa Tenggara Timur kepada PAD Pemda Tk. II sangat besar. pada TA 1997/1998 PAD Pemda Tk. II sekitar Rp. 19,93 milyar naik menjadi Rp. 20,34 milyar pada TA 1998/1999 dan seterusnya pada tahun 1999/2000 naik menjadi 22,95 milyar rupiah atau naik sebesar 12,81 persen dibanding TA 1998/1999 dan pada TA 2000 naik sebesar 24,88 milyar rupiah atau naik sebesar 8,42 persen dibanding TA 1999/2000.

Tabel b.

Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat II
Propinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 1997/1998 - 2000

(Rp. juta)

Tahun Anggaran	PAD	Subsidi	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5
1997/1998	19 934	430 170	46 981	497 085
1998/1999	20 344	418 836	52 399	491 579
1999/2000	22 950	592 719	79 708	695 377
2000	24 882	697 582	78 832	801 296

Pada TA 1999/2000 PAD Pemda Tk. II di seluruh Nusa Tenggara Timur naik sebesar 2.61 miliar rupiah, naik dari 20.34 miliar rupiah tahun 1998/1999 menjadi 22,95 miliar rupiah. Kenaikan tersebut lebih dipicu oleh kenaikan penerimaan dari pajak daerah sebesar Rp. 2,74 miliar atau naik dari Rp. 5.28 miliar pada TA 1998/1999 menjadi Rp. 8,02 miliar pada tahun 1999/2000. Sementara penerimaan dari retribusi daerah dan penerimaan lain-lain pada TA 1998/1999 mengalami penurunan dibandingkan dengan TA 1997/1998, sedangkan penerimaan dari laba usaha daerah mengalami penurunan dari TA 1997/1998 sampai dengan TA 2000. Pada TA 2000 kenaikan PAD lebih banyak dipicu oleh kenaikan penerimaan lain-lain. yakni naik sebesar 1.54 miliar dibanding TA 1999/2000.(Tabel 2.1)

Penerimaan dari retribusi daerah mengalami kenaikan yang cukup besar pada TA 1999/2000. Jika pada TA 1998/1999 penerimaan dari retribusi sebesar Rp. 8,84 miliar maka pada tahun 1999/2000 mengalami kenaikan menjadi Rp. 11.37 miliar atau naik sebesar Rp. 2,53 miliar. Pada tahun Anggaran 2000 mengalami penurunan sebesar 615 juta rupiah, turun dari 11.37 miliar menjadi 10.76 miliar.

Pada TA 2000 kabupaten yang PAD-nya paling besar adalah Kota Kupang yakni sebesar Rp. 3.45 miliar dan yang terkecil adalah Kabupaten Lembata hanya sebesar Rp. 739 juta. Yang memberikan sumbangan paling besar terhadap PAD Tk. II Nusa

Tenggara Timur adalah dari retribusi daerah yakni sebesar 43,24 persen, kemudian penerimaan dari sektor pajak daerah pada urutan kedua sebesar 35,22 persen. Yang paling kecil sumbangannya adalah penerimaan dari laba BUMD yang hanya sebesar 0,69 persen, sebesar 171 juta rupiah pada tahun 2000.(Tabel 2.4).

Kabupaten yang retribusi daerahnya paling besar pada TA 2000 adalah Kota Kupang yakni Rp. 1,645 miliar sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Lembata yang hanya sebesar Rp. 247 juta. Pada TA 2000 kabupaten yang mendapat subsidi daerah otonom dan bantuan pembangunan paling besar adalah dari kabupaten Kupang, yakni sebesar Rp. 76,26 miliar , sementara yang paling kecil adalah dari kabupaten TTU yakni sebesar Rp. 24,51 miliar.(Tabel 2.4)..

II. Pengeluaran Daerah Nusa Tenggara Timur

a. Pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat I

Pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur terbesar tahun 2000 (6,19 persen) adalah membiayai pengeluaran pembangunan, sedangkan sisanya sebesar 38,81 persen dipakai untuk membiayai pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang dan lain-lain. Dalam 4 tahun belakang ini, pengeluaran rutin berkisar 50 sampai dengan 62 miliar rupiah, sedang pengeluaran pembangunan berkisar 77 sampai dengan 120 miliar rupiah.

Untuk membuka isolasi daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur maka selama lima tahun terakhir, yaitu TA 1997/1998 sampai dengan 2000 pengeluaran pembangunan Pemda Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur lebih diarahkan kepada sektor transportasi/prasarana perhubungan. (Tabel 1.3.).

a.1. Pengeluaran Pembangunan PEMDA Tingkat I

Pada TA 1998/1999 total pengeluaran pembangunan untuk sektor transportasi sebesar Rp. 37.98 miliar atau sebesar 52.43 persen dari total pengeluaran pembangunan. Pada TA 1999/2000 total pengeluaran pembangunan naik sebesar 66,09 persen dari total pengeluaran pembangunan pada TA 1998/1999 menjadi Rp. 120,312 miliar , dan pengeluaran untuk sektor transportasi juga naik dari Rp. 37,98 miliar pada TA 1998/1999 menjadi Rp. 42,30 miliar pada TA 1999/2000, namun

persentase distribusi pengeluaran pembangunan untuk sektor transportasi pada TA 1999/2000 mengalami penurunan dari 52,43 persen pada TA 1998/1999 menjadi 35,16 persen pada TA 1999/2000. Sementara pada TA 2000 pengeluaran untuk sektor transportasi menurun sebesar 17,39 miliar, demikian pula persentase distribusi pengeluaran pembangunan untuk sektor transportasi menurun dari 35,16 persen pada TA 1999/2000 menjadi 25,66 % pada TA 2000.

Tabel c.

**Pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat I
Propinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 1997/1998 - 2000**

(Rp. juta)

Tahun Anggaran	Rutin	Pembangunan	Jumlah
1	2	3	4
1997/1998	53 520	77 123	130 643
1998/1999	50 464	72 438	122 902
1999/2000	62 086	120 312	182 398
2000	61 558	97 048	158 606

Pada TA 2000 akibat dampak krisis moneter yang terus berkepanjangan yang berdampak pada rakyat kecil maka pemerintah juga memprioritaskan pada pengeluaran untuk kesehatan, kesejahteraan sosial peranan wanita, anak dan remaja (seperti program JPS dan lain-lain). Pada TA 2000 meningkat sebesar 93,33 %, meningkat dari 11.76 miliar pada TA 1999/2000 menjadi 22,74 miliar pada TA 2000.

Perhatian pemerintah terhadap peningkatan mutu SDM terlihat pada besarnya dana pendidikan pada sektor ini. Pada TA 2000 sektor pendidikan naik cukup tinggi, yakni sebesar 87,22 persen, naik dari 4,44 miliar pada TA 1999/2000 menjadi 8,31 miliar pada TA 2000.

Dalam TA 2000 anggaran untuk pembangunan daerah dan pemukiman mengalami penurunan yang cukup tinggi, yakni sebesar -60,97 persen, yakni turun dari Rp.35,32 miliar menjadi Rp.13,78 miliar, sektor hukum yang paling kecil

menyerap dana pengeluaran pembangunan, hanya 0,31 persen dari total pengeluaran pembangunan.

a.2. Pengeluaran Rutin PEMDA Tingkat I

Pada TA 1997/1998 dari total pengeluaran rutin sebesar Rp. 53,52 miliar sebanyak Rp. 17,87 miliar digunakan untuk belanja pegawai atau sekitar 33,38 persen dari total pengeluaran rutin, sementara pengeluaran untuk ganjaran, subsidi dan sumbangannya kepada daerah bawahan menyerap dana yang cukup besar, pada urutan kedua yakni sebesar Rp. 10,93 miliar atau sebesar 20,42 persen dari total pengeluaran rutin, sementara pada TA 2000 pengeluaran untuk ganjaran, subsidi dan sumbangannya kepada daerah bawahan mengalami penurunan yang paling tinggi dibandingkan dengan pengeluaran yang lainnya, yakni turun sebesar -80,21 persen dibanding TA 1999/2000. Walaupun total pengeluaran rutin menurun dari Rp 53,52 miliar pada TA 1997/1998 menjadi Rp. 50,46 miliar pada TA 1998/1999 namun, pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan dan lain-lain terus meningkat sedangkan yang mengalami penurunan adalah pengeluaran untuk ganjaran, subsidi dan sumbangannya kepada daerah bawahan dan pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain seperti bantuan untuk instansi vertikal Depdagri dan lain-lain yakni Rp. 10,93 miliar pada TA 1997/1998 menjadi Rp. 3,95 miliar pada TA 1998/1999 dan TA 1999/2000 menjadi Rp. 2,14 miliar dan Rp. 5,19 miliar pada TA 1997/1998 menjadi Rp. 4,53 miliar pada TA 1998/1999 dan pada TA 1999/2000 turun lagi menjadi Rp. 2,91 miliar dan pada TA 2000 menurun lagi menjadi Rp. 1,53 miliar (Tabel 1.2).

Pada TA 2000 walaupun total pengeluaran rutin mengalami penurunan dibanding TA 1999/2000 namun pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja lain-lain mengalami peningkatan: yang paling tinggi adalah pengeluaran untuk belanja barang, yakni naik sebesar 3,29 miliar.

b. Pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat II

Berbeda dengan pengeluaran Pemda Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang lebih banyak digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan, pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur lebih banyak

digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, perjalanan dinas dan belanja lain-lain. (Tabel 2.2 dan Tabel 2.3).

Tabel d.

**Pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat II
Propinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 1997/1998 - 2000**

(Rp. juta)

Tahun Anggaran	Rutin	Pembangunan	Jumlah
1	2	3	5
1997/1998	292 307	196 393	488 700
1998/1999	343 347	122 863	466 210
1999/2000	473 344	198 244	671 588
2000	479 281	274 434	753 715

b.1. Pengeluaran Rutin PEMDA Tingkat I

Pada TA 2000 sebanyak Rp. 479.281 miliar atau 63,59 persen dari total pengeluaran Pemda Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Dari pengeluaran rutin sebesar Rp. 479.281 miliar sebanyak Rp. 411.27 miliar digunakan untuk belanja pegawai atau sebesar 85,81 persen dari total pengeluaran rutin. Sedangkan pengeluaran pembangunan hanya menyerap dana sebesar Rp. 274.43 miliar atau hanya sebesar 36,41 persen dari total pengeluaran. Pada TA 2000 pengeluaran rutin untuk biaya pemeliharaan,belanja lain-lain, angsuran pinjaman, sumbangan kepada daerah bawahan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, pengeluaran tidak tersangka mengalami penurunan dibanding TA 1999/2000, yang mengalami penurunan paling tinggi adalah belanja lain-lain, yakni sebesar 4,1 miliar.

b.2. Pengeluaran Pembangunan PEMDA Tingkat I

Pada TA 1999/2000 pengeluaran pembangunan untuk sektor transportasi adalah yang paling tinggi dibanding pengeluaran pembangunan lainnya. Sementara pada

TA 2000 pengeluaran pembangunan pada sektor perumahan dan pemukiman menempati urutan yang paling tinggi, yakni sebanyak 56,8 milyar atau sebesar 20,71 persen dari total pengeluaran pembangunan. Sedangkan urutan kedua pada sektor transportasi yakni sebesar 46,4 milyar atau sebesar 16,90 persen dari total pengeluaran pembangunan.

Sektor yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibanding TA 1999/2000 adalah sektor pertanian dan kehutanan, sektor transportasi, pembangunan daerah dan pemukiman, perumahan dan pemukiman, aparatur pemerintah dan pengawasan yang paling tinggi peningkatannya pada TA 2000 adalah sektor perumahan dan pemukiman yakni sebesar 211,55 persen dibanding TA 1999/2000. Sedangkan pengeluaran untuk sektor pertambangan dan energi paling kecil, yakni hanya sebesar 0,03 persen dari total pengeluaran pembangunan daerah tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur pada TA 2000. Sementara pengeluaran untuk subsidi pembangunan kepada daerah bawahannya hanya sebesar 0,05 persen dari total pengeluaran pembangunan daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2000.

Statistik Keuangan

Pemerintah Daerah Tingkat I

(Propinsi)

Tabel 1

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat I
Propinsi Nusa Tenggara Timur
1997/1998-2000

(000 Rp)

Jenis Penerimaan	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
	1	2	3	5
1. Bagian Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu	5 787 983	7 511 332	9 533 552	10 461 913
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah	29 053 661	17 607 013	20 489 967	20 063 358
a. Pajak Daerah	9 861 531	6 691 110	9 792 470	12 781 288
b. Retribusi Daerah	10 852 910	8 187 335	8 169 835	5 267 213
c. Bagiab Laba Usaha Daerah	424 957	510 489	100 000	4 000
d. Penerimaan dari Dinas- dinas	5 980 463	-	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	1 933 800	2 218 079	2 427 662	2 010 857
3. Bagian Pendptn yg berasal dari pemberian pemerintah & atau instansi yg lebih tinggi	103 313 402	107 319 827	162 836 469	252 747 057
a. Bagi Hasil Pajak	5 649 617	5 488 231	8 660 402	8 815 284
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	2 809 805	3 202 533	2 535 282	3 789 447
c. Subsidi Daerah Otonom	21 318 118	23 404 463	34 781 565	38 213 957
d. Bantuan Pembangunan	73 535 862	75 224 600	116 859 220	101 928 369
e. Penerimaan Lainnya	-	-	-	-
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	-	-
a. Pinjaman dari Pem. Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb Keu Dalam Negeri	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
d. Pinjaman lainnya	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	138 155 046	132 438 172	192 859 988	183 272 328

Tabel 1.2

Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat I
Propinsi Nusa Tenggara Timur
1997/1998-2000

(000 Rp.)

Jenis Pengeluaran	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
	1	2	3	4
1. Belanja Pegawai	17 867 702	20 260 672	28 960 024	30 719 006
2. Belanja Barang	10 366 382	12 088 021	13 120 406	16 407 049
3. Biaya Pemeliharaan	1 226 544	1 746 408	2 600 013	1 834 976
4. Belanja Perjalanan Dinas	3 089 324	3 149 950	3 875 974	1 799 769
5. Belanja Lain-lain	4 838 793	4 121 961	7 783 607	8 524 170
6. Angsuran Pinjaman	14 667	42 000	-	-
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan kepada Daerah Bawahan	10 929 128	3 947 642	2 143 163	424 223
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	5 188 018	4 525 913	2 910 266	1 533 271
9. Pengeluaran tidak tersangka	-	581 168	692 612	315 750
Jumlah Pengeluaran Rutin	53 520 558	50 463 735	62 086 065	61 558 214

Tabel 1.3

**Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat I
Propinsi Nusa Tenggara Timur
1997/1998-2000**

(000 Rp.)

Jenis Pengeluaran	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
1	2	3	4	5
1. Industri	187 877	137 344	653 653	678 879
2. Pertanian dan Kehutanan	2 448 904	2 141 344	2 680 041	3 448 995
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	1 675 860	2 298 991	2 479 335	3 411 976
4. Tenaga Kerja	69 810	92 270	365 604	854 502
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	1 578 503	1 553 865	2 504 794	2 195 917
6. Transportasi	40 032 068	37 982 499	42 299 304	24 907 262
7. Pertambangan dan Energi	717 413	364 075	1 145 561	529 680
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	428 951	599 686	696 399	846 795
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	9 177 408	8 207 054	35 316 724	13 784 339
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	7 137 319	6 232 434	6 154 406	5 382 254
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga	1 176 605	1 711 197	4 437 053	8 306 980
12. Kependudukan dan KB	-	-	-	-
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja	1 984 260	2 800 750	11 763 177	22 742 099
14. Perumahan dan Pemukiman	940 845	1 040 319	692 905	770 965
15. Agama	144 525	259 569	463 508	-
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1 132 545	863 887	1 036 807	1 197 794
17. Hukum	123 534	192 044	218 204	225 127
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	6 210 316	4 414 563	6 379 446	7 421 909
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	848 155	421 433	548 985	405 270
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	248 258	247 186	249 104	296 975
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan	860 000	877 877	227 000	-
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	77 123 156	72 438 387	120 312 010	97 047 718

Statistik Keuangan

**Pemerintah Daerah Tingkat
II**

(Kabupaten/Kotamadya)

Tabel 2

Tabel 2.1
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur
1997/1998-2000

(000 Rp.)

Jenis Penerimaan	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
	1	2	3	4
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu</i>	8 929 255	8 855 766	25 885 625	22 576 174
<i>2. Bagian Pendapatan Asli Daerah</i>	19 934 356	20 344 423	22 949 943	24 882 087
a. Pajak Daerah	1 847 364	5 279 380	8 016 924	8 762 761
b. Retribusi Daerah	9 984 925	8 838 759	11 374 516	10 759 639
c. Bagian Laba Usaha Daerah	493 435	418 628	112 243	171 538
d. Penerimaan dari Dinas dinas	4 498 698	3 480 431	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	3 109 933	2 327 225	3 446 260	4 988 148
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>	468 222 209	462 379 782	646 540 962	753 838 292
a. Bagi Hasil Pajak	31 229 150	41 572 823	52 741 264	54 093 561
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	6 823 041	1 970 678	1 080 900	2 063 391
c. Subsidi daerah Otonom	250 214 947	295 509 442	411 455 988	421 320 895
d. Bantuan Pembangunan	179 955 071	123 326 839	181 262 810	276 260 956
e. Penerimaan Lainnya	-	-	-	99 489
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>	-	-	-	-
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	497 085 820	491 579 971	695 376 530	801 296 553

Tabel 2.2
Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur
1997/1998-2000

(000 Rp.)

Jenis Pengeluaran	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
	1	2	3	4
1. Belanja Pegawai	242 468 453	285 438 910	402 093 067	411 269 655
2. Belanja Barang	20 060 479	22 646 242	28 127 160	29 988 992
3. Biaya Pemeliharaan	4 034 078	5 082 782	6 325 122	5 716 033
4. Belanja Perjalanan Dinas	6 657 515	6 287 094	8 020 030	9 409 403
5. Belanja Lain-lain	10 619 320	10 908 808	13 645 211	9 549 763
6. Angsuran Pinjaman	619 650	1 145 437	253 082	107 525
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan kepada Daerah Bawahan	2 317 503	3 311 155	4 941 587	4 669 257
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	4 698 570	5 342 307	8 115 964	7 751 804
9. Pengeluaran tidak tersangka	831 644	3 183 867	1 822 305	818 538
Jumlah Pengeluaran Rutin	292 307 212	343 346 602	473 343 528	479 280 972

Tabel 2.3
Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur
1997/1998-2000

(000 Rp.)

Jenis Pengeluaran	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
1	2	3	4	5
1. Industri	359 039	411 779	1 620 327	1 683 992
2. Pertanian dan Kehutanan	6 157 644	3 916 614	17 961 092	32 364 535
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	3 572 437	952 254	5 976 934	6 603 866
4. Tenaga Kerja	26 908	40 000	40 000	362 454
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	3 280 967	2 417 283	6 102 755	10 946 043
6. Transportasi	68 716 528	50 617 148	32 601 122	46 395 090
7. Pertambangan dan Energi	122 373	407 974	1 161 018	79 501
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	669 929	926 272	1 931 354	1 703 811
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	15 993 510	7 030 323	30 737 991	41 723 066
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	8 767 652	8 727 622	21 629 212	12 365 940
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga	41 040 771	23 982 128	25 325 291	21 867 474
12. Kependudukan dan KB	497 295	109 134	620 946	659 364
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja	25 351 650	6 020 102	9 248 273	10 598 932
14. Perumahan dan Pemukiman	4 429 362	3 011 448	18 242 654	56 834 395
15. Agama	175 752	126 944	320 803	502 357
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 002 996	1 696 456	2 613 373	2 577 236
17. Hukum	281 690	292 070	794 419	1 220 326
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	10 985 412	10 744 611	17 950 710	21 867 200
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	1 094 549	699 292	1 795 244	1 601 620
20. Keamanan dan Keteriban Umum	591 801	489 437	1 570 393	1 629 870
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahans	2 275 379	244 492	-	134 171
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	196 393 642	122 863 381	198 243 911	274 433 943

Tabel 2.4
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur
2000

(000 Rp)

Jenis Penerimaan	S. Barat	S. Timur	Kupang	TTS
1	2	3	4	5
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu</i>	1 107 566	4 419 513	3 196 153	2 527 425
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>	1 479 027	1 615 718	2 451 066	2 066 361
a. Pajak Daerah	460 214	604 918	1 453 800	714 236
b. Retribusi Daerah	562 021	654 134	661 626	899 496
c. Bagian Laba Usaha Daerah	0	15 000	42 500	19 538
d. Penerimaan dari Dinas dinas	-	-	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	456 792	341 666	293 140	42 3 091
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>	46 624 683	45 629 976	81 232 052	74 491 962
a. Bagi Hasil Pajak	4 192 192	4 368 124	4 314 641	3 878 175
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	42 749	108 960	655 043	66 362
c. Subsidi daerah Otonom	28 112 403	22 615 854	41 966 476	44 563 460
d. Bantuan Pembangunan	14 277 339	18 547 038	34 295 892	25 993 965
e. Penerimaan Lainnya	-	-	-	-
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>	-	-	-	-
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	49 211 276	51 665 207	86 879 271	79 075 748

Tabel 2.4
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur
2000

Sambungan.....	(000 Rp)			
Jenis Penerimaan	TTU	Belu	Alor	Flotim
1	2	3	4	5
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran</i>				
Tahun Lalu	217 765	1 944 688	774 605	3 011 454
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>	<i>1 989 607</i>	<i>1 779 641</i>	<i>1 250 913</i>	<i>1 667 789</i>
a. Pajak Daerah	366 065	592 933	297 416	377 931
b. Retribusi Daerah	427 533	863 729	806 012	608 204
c. Bagian Laba Usaha Daerah	10 000	9 500	-	-
d. Penerimaan dari Dinas dinas	-	-	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	1 186 189	323 479	147 485	681 654
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>	<i>58'995 667</i>	<i>70 689 026</i>	<i>41 445 871</i>	<i>44 394 623</i>
a. Bagi Hasil Pajak	4 473 052	4 959 178	3 213 673	3 303 966
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	116 992	164 440	43 397	504 819
c. Subsidi daerah Otonom	24 748 930	43 080 859	23 141 965	30 530 056
d. Bantuan Pembangunan	29 656 693	22 484 549	14 947 347	10 055 782
e. Penerimaan Lainnya	-	-	99 489	-
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	74 413 355	74 413 355	43 471 389	49 073 866

Tabel 2.4
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur
2000

Sambungan	(000 Rp)			
Jenis Penerimaan	Sikka	Ende	Ngada	Manggarai
1	2	3	4	5
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran</i>				
Tahun Lalu	625 750	719 863	1 668 985	749 484
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>				
a. Pajak Daerah	561 722	567 962	261 418	538 438
b. Retribusi Daerah	674 121	864 632	805 371	1 050 970
c. Bagian Laba Usaha Daerah	-	7 000	20 000	30 000
d. Penerimaan dari Dinas dinas	-	-	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	185 734	122 624	220 224	305 679
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari</i>				
<i>Pemberian Pemerintah dan</i>				
<i>atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>				
a. Bagi Hasil Pajak	47 705 406	44 705 050	54 631 421	63 250 979
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	3 766 288	3 951 564	4 028 167	4 760 653
c. Subsidi daerah Otonom	56 219	62 976	45 101	49 111
d. Bantuan Pembangunan	28 552 803	29 763 934	28 779 318	44 694 925
e. Penerimaan Lainnya	15 330 096	10 926 576	21 778 835	13 746 290
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>				
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	49 752 733	46 987 131	57 607 419	65 925 550

Tabel 2.4
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur
2000

Sambungan				(000 Rp)
Jenis Penerimaan	Lembata	K. Kupang	Jumlah	
/	2	3	4	5
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran</i>				
Tahun Lalu	-	0	1 612 922	22 576 174
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>	-	739 075	3 436 994	24 882 087
a. Pajak Daerah	-	383 642	1 582 066	8 762 761
b. Retribusi Daerah	-	246 759	1 645 211	10 759 639
c. Bagian Laba Usaha Daerah	-	18 000	-	171 538
d. Penerimaan dari Dinas dinas	-	-	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	-	90 674	209 717	4 988 148
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>	-	26 159 180	53 882 396	753 838 292
a. Bagi Hasil Pajak	-	1 532 412	3 361 476	54 093 561
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	-	118 641	28 581	2 063 391
c. Subsidi daerah Otonom	-	10 670 557	20 109 355	421 320 895
d. Bantuan Pembangunan	-	13 837 570	30 382 964	276 260 956
e. Penerimaan Lainnya	-	-	-	99 489
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>	-	-	-	-
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	-	26 898 255	58 932 312	801 096 553

Tabel 2.4.1
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sumba Barat
1997/1998-2000

Jenis Penerimaan	(000 Rp)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
	1	2	3	4
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu</i>	734 344	411 941	1 576 187	1 107 566
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>	927 545	891 577	891 202	1 479 027
a. Pajak Daerah	72 584	283 161	428 692	460 214
b. Retribusi Daerah	611 095	364 671	364 308	562 021
c. Bagian Laba Usaha Daerah	19 644	26 688	-	0
d. Penerimaan dari Dinas dinas	107 758	103 415	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	116 464	113 642	98 202	456 792
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>	37 839 926	37 077 086	49 327 305	46 624 683
a. Bagi Hasil Pajak	2 894 660	3 606 470	4 040 061	4 192 192
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	371 742	5 844	18 356	42 749
c. Subsidi daerah Otonom	18 418 558	21 083 110	29 459 756	28 112 403
d. Bantuan Pembangunan	16 154 966	12 381 662	15 809 132	14 277 339
e. Penerimaan Lainnya	-	-	-	-
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>	-	-	-	-
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	39 501 815	38 380 604	51 794 694	49 211 276

Tabel 2.4.2
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sumba Timur
1997/1998-2000

Jenis Penerimaan 1	(000 Rp)			
	1997/1998 2	1998/1999 3	1999/2000 4	2000 5
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu</i>	88 828	771 822	3 292 585	4 419 513
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>	1 824 604	1 343 448	1 475 648	1 615 718
a. Pajak Daerah	145 831	354 335	484 965	604 918
b. Retribusi Daerah	1 337 876	635 000	719 105	654 134
c. Bagian Laba Usaha Daerah	66 424	59 810	11 000	15 000
d. Penerimaan dari Dinas donas	72 565	79 375	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	201 908	214 928	260 578	341 666
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>	26 684 432	28 344 835	34 553 792	45 629 976
a. Bagi Hasil Pajak	1 719 069	2 849 944	4 079 119	4 368 124
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	456 836	10 569	10 031	108 960
c. Subsidi daerah Otonom	14 055 012	16 728 718	21 828 500	22 615 854
d. Bantuan Pembangunan	10 453 515	8 755 604	8 636 142	18 547 038
e. Penerimaan Lainnya	-	-	-	-
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>	-	-	-	-
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	28 597 864	30 460 105	39 322 025	51 665 207

Tabel 2.4.3
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kupang
1997/1998-2000

Jenis Penerimaan	(000 Rp)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
	1	2	3	4
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran</i>				
Tahun Lalu	1 224 102	2 022 293	3 411 722	3 196 153
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>				
a. Pajak Daerah	130 660	850 631	992 307	1 453 800
b. Retribusi Daerah	305 375	426 421	485 284	661 626
c. Bagian Laba Usaha Daerah	195 021	36 940	50 000	42 500
d. Penerimaan dari Dinas donas	595 514	538 241	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	485 767	490 402	858 115	293 140
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>				
a. Bagi Hasil Pajak	3 507 129	2 856 956	4 606 757	4 314 641
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	956 192	55 937	12 380	655 043
c. Subsidi daerah Otonom	33 065 451	30 209 543	42 288 687	41 966 476
d. Bantuan Pembangunan	19 869 249	12 616 526	32 228 460	34 295 892
e. Penerimaan Lainnya	-	-	-	-
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>				
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	60 334 460	50 103 890	84 933 712	86 879 271

Tabel 2.4.4
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Timor Tengah Selatan
1997/1998-2000

Jenis Penerimaan <i>l</i>	(000 Rp)			
	1997/1998 <i>2</i>	1998/1999 <i>3</i>	1999/2000 <i>4</i>	2000 <i>5</i>
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu</i>	727 965	1 308 046	4 647 284	2 527 425
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>	2 632 960	2 254 778	3 015 804	2 066 361
a. Pajak Daerah	162 052	282 018	969 934	714 236
b. Retribusi Daerah	663 188	641 067	1 644 075	899 496
c. Bagian Laba Usaha Daerah	19 387	34 580	22 243	19 538
d. Penerimaan dari Dinas donas	1 606 686	1 076 972	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	181 647	220 141	379 552	42 3 091
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>	50 958 344	46 731 126	66 467 216	74 491 962
a. Bagi Hasil Pajak	3 129 706	3 584 932	4 244 485	3 878 175
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	456 161	270 883	181 451	66 362
c. Subsidi daerah Otonom	28 612 536	33 436 766	47 284 154	44 563 460
d. Bantuan Pembangunan	18 759 941	9 438 545	14 757 126	25 993 965
e. Penerimaan Lainnya	-	-	-	-
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>	-	-	-	-
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	54 319 269	50 293 950	74 130 304	79 075 748

Tabel 2.4.5
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Timor Tengah Utara
1997/1998-2000

Jenis Penerimaan	(000 Rp)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
	1	2	3	4
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran</i>				
Tahun Lalu	139 576	174 628	1 153 290	217 765
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>				
a. Pajak Daerah	83 982	316 830	426 175	366 065
b. Retribusi Daerah	405 209	336 636	496 159	427 533
c. Bagian Laba Usaha Daerah	9 610	57 082	2 000	10 000
d. Penerimaan dari Dinas dinas	277 968	128 459	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	72 854	88 248	123 989	1 186 189
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>				
	30 950 985	28 923 815	34 056 120	58 995 667
a. Bagi Hasil Pajak	2 897 164	3 350 027	3 931 095	4 473 052
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	815 539	48 521	66 763	116 992
c. Subsidi daerah Otonom	13 674 812	15 671 260	22 385 727	24 748 930
d. Bantuan Pembangunan	13 563 470	9 854 007	7 672 535	29 656 693
e. Penerimaan Lainnya	-	-	-	-
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>	-	-	-	-
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	31 940 184	30 025 698	36 257 733	74 413 355

Tabel 2.4.6
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Belu
1997/1998-2000

Jenis Penerimaan 1	(000 Rp)			
	1997/1998 2	1998/1999 3	1999/2000 4	2000 5
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran</i>				
Tahun Lalu	603 767	286 133	824 540	1 944 688
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>	1 234 750	1 366 376	1 486 091	1 779 641
a. Pajak Daerah	116 333	430 135	546 254	592 933
b. Retribusi Daerah	703 214	572 760	823 571	863 729
c. Bagian Laba Usaha Daerah	18 487	34 114	10 000	9.500
d. Penerimaan dari Dinas dinas	323 352	230 640	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	73 364	97 727	106 266	323 479
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari</i> <i>Pemberian Pemerintah dan</i> <i>atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>	34 250 828	30 349 549	47 180 041	70 689 026
a. Bagi Hasil Pajak	3 168 939	2 485 692	4 590 337	4 959 178
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	723 769	191 264	98 660	164 440
c. Subsidi daerah Otonom	16 794 650	18 252 358	25 043 780	43 080 859
d. Bantuan Pembangunan	13 563 470	9 420 235	17 447 264	22 484 549
e. Penerimaan Lainnya	-	-	-	-
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>	-	-	-	-
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	36 089 345	32 002 058	49 490 672	74 413 355

Tabel 2.4.7.

**Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Alor
1997/1998-2000**

(000 Rp)

Jenis Penerimaan	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
/	2	3	4	5
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran</i>				
Tahun Lalu	451 913	717 870	1 452 725	774 605
2. Bagian Pendapatan Asli daerah	1 381 202	1 580 936	1 365 338	1 250 913
a. Pajak Daerah	53 435	173 994	414 859	297 416
b. Retribusi Daerah	1 033 793	1 095 541	717 410	806 012
c. Bagian Laba Usaha Daerah	4 472	10 629	-	-
d. Penerimaan dari Dinas dinas	213 472	216 210	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	76 030	84 562	233 069	147 485
3. Bagian Pend yg Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi	27 581 284	26 928 492	41 648 573	41 445 871
a. Bagi Hasil Pajak	1 937 040	2 284 235	4 559 318	3 213 673
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	234 261	144 606	324 954	43 397
c. Subsidi daerah Otonom	14 727 492	17 310 826	23 954 716	23 141 965
d. Bantuan Pembangunan	10 682 491	7 188 825	12 809 585	14 947 347
e. Penerimaan Lainnya	-	-	-	99 489
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	-	-
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	29 414 399	29 227 298	44 466 636	43 471 389

Tabel 2.4.8
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Flores Timur
1997/1998-2000

Jenis Penerimaan	(000 Rp)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
	1	2	3	4
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran</i>				
<i>Tahun Lalu</i>	270 321	48 247	2 360 928	3 011 454
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>	1 948 809	1 389 614	1 261 105	1 667 789
a. Pajak Daerah	262 258	241 377	285 725	377 931
b. Retribusi Daerah	663 072	651 650	718 316	608 204
c. Bagian Laba Usaha Daerah	17 202	16 205	-	-
d. Penerimaan dari Dinas dinas	286 939	277 142	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	719 338	203 240	257 064	681 654
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari</i>				
<i>Pemberian Pemerintah dan</i>				
<i>atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>				
a. Bagi Hasil Pajak	44 742 449	42 320 867	53 739 991	44 394 623
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	2 830 288	4 319 119	4 197 523	3 303 966
c. Subsidi daerah Otonom	535 702	381 593	135 481	504 819
d. Bantuan Pembangunan	25 186 143	29 404 742	40 997 517	30 530 056
e. Penerimaan Lainnya	16 190 316	8 215 413	8 409 470	10 055 782
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>				
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	46 961 579	43 758 728	57 362 024	49 073 866

Tabel 2.4.9

**Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sikka
1997/1998-2000**

(000 Rp)

Jenis Penerimaan	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran</i>				
Tahun Lalu	1 955 448	1 112 514	932 297	625 750
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>	1 939 006	1 172 669	1 201 254	1 421 577
a. Pajak Daerah	236 103	242 959	300 000	561 722
b. Retribusi Daerah	1 129 913	587 439	775 292	674 121
c. Bagian Laba Usaha Daerah	38 756	17 250	-	-
d. Penerimaan dari Dinas donas	172 431	100 250	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	361 803	224 771	125 962	185 734
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari</i>				
<i>Pemberian Pemerintah dan</i>				
<i>atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>				
a. Bagi Hasil Pajak	35 904 731	33 038 618	50 958 461	47 705 406
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	2 352 842	3 547 844	3 791 745	3 766 288
c. Subsidi daerah Otonom	463 791	444 494	8 265	56 219
d. Bantuan Pembangunan	18 122 645	21 477 184	29 929 348	28 552 803
e. Penerimaan Lainnya	14 965 453	7 569 096	17 229 103	15 330 096
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>	-	-	-	-
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	39 799 185	35 323 801	53 092 012	49 752 733

Tabel 2.4.10
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ende
1997/1998-2000

Jenis Penerimaan	(000 Rp)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
<i>i</i>	2	3	4	5
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu</i>				
	398 182	500 181	2 016 164	719 863
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>	1 465 622	1 428 003	1 802 761	1 562 218
a. Pajak Daerah	188 900	250 986	537 026	567 962
b. Retribusi Daerah	996 538	909 311	1 075 987	864 632
c. Bagian Laba Usaha Daerah	10 169	11 542	8 500	7 000
d. Penerimaan dari Dinas donas	79 112	73 787	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	190 903	182 377	181 248	122 624
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>	31 010 801	34 437 456	41 745 743	44 705 050
a. Bagi Hasil Pajak	2 070 576	3 301 597	3 427 584	3 951 564
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	650 942	227 274	102 088	62 976
c. Subsidi daerah Otonom	19 734 640	22 963 109	31 201 900	29 763 934
d. Bantuan Pembangunan	8 554 643	7 945 476	7 014 171	10 926 576
e. Penerimaan Lainnya	-	-	-	-
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>	-	-	-	-
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	32 874 605	36 365 640	45 564 668	46 987 131

Tabel 2.4.11
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ngada
1997/1998-2000

Jenis Penerimaan	(000 Rp)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
	1	2	3	4
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran</i>				
Tahun Lalu	505 999	173 320	1 043 351	1 668 985
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>	1 226 700	1 335 415	1 320 055	1 307 013
a. Pajak Daerah	132 365	291 960	317 864	261 418
b. Retribusi Daerah	640 524	670 356	726 868	805 371
c. Bagian Laba Usaha Daerah	16 160	24 046	2 500	20 000
d. Penerimaan dari Dinas dinas	210 206	200 003	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	227 445	149 050	272 823	220 224
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari</i> <i>Pemberian Pemerintah dan</i> <i>atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>	356 736 682	35 180 982	42 176 028	54 631 421
a. Bagi Hasil Pajak	2 248 853	3 301 053	3 696 569	4 028 167
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	503 168	135 231	86 046	45 101
c. Subsidi daerah Otonom	18 569 912	21 256 839	30 373 688	28 779 318
d. Bantuan Pembangunan	14 351 749	10 487 859	8 019 724	21 778 835
e. Penerimaan Lainnya	-	-	-	-
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>	-	-	-	-
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	37 406 381	36 689 717	44 539 435	57 607 419

Tabel 2.4.12
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai
1997/1998-2000

Jenis Penerimaan	(000 Rp)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
	1	2	3	4
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu</i>				
	1 828 809	1 388 770	2 298 947	749 484
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>				
a. Pajak Daerah	262 862	228 013	535 043	538 438
b. Retribusi Daerah	1 495 129	971 918	1 091 971	1 050 970
c. Bagian Laba Usaha Daerah	78 103	89 743	6 000	30 000
d. Penerimaan dari Dinas dinas	552 694	455 937	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	420 410	257 137	483 796	305 679
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>				
	53 942 487	49 495 944	61 141 539	63 250 979
a. Bagi Hasil Pajak	2 472 885	3 036 714	3 632 524	4 760 653
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	654 939	30 113	2 362	49 111
c. Subsidi daerah Otonom	29 253 096	34 441 776	47 081 535	44 694 925
d. Bantuan Pembangunan	21 561 567	11 987 341	10 425 118	13 746 290
e. Penerimaan Lainnya	-	-	-	-
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>				
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	58 562 494	52 887 462	65 557 296	65 925 550

Tabel 2.4.13
Realisasi Penerimaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Kupang
1997/1998-2000

Jenis Penerimaan <i>1</i>	(000 Rp)			
	1997/1998 <i>2</i>	1998/1999 <i>3</i>	1999/2000 <i>4</i>	2000 <i>5</i>
<i>1. Bagian Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu</i>	-	-	875 605	1 612 922
<i>2. Bagian Pendapatan Asli daerah</i>	-	2 308 879	3 579 846	3 436 994
a. Pajak Daerah	-	1 332 981	1 778 080	1 582 066
b. Retribusi Daerah	-	975 898	1 736 170	1 645 211
c. Bagian Laba Usaha Daerah	-	-	-	-
d. Penerimaan dari Dinas dinas	-	-	-	-
e. Penerimaan Lain-lain	-	-	65 596	209 717
<i>3. Bagian Pend yg Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang Lebih Tinggi</i>	-	23 711 051	44 409 870	53 882 396
a. Bagi Hasil Pajak	-	3 048 240	3 944 147	3 361 476
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	-	24 349	34 063	28 581
c. Subsidi daerah Otonom	-	13 273 212	19 626 680	20 109 355
d. Bantuan Pembangunan	-	7 365 250	20 804 980	30 382 964
e. Penerimaan Lainnya	-	-	-	-
<i>4. Pinjaman Pemerintah Daerah</i>	-	-	-	-
a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
b. Pinjaman dari Lemb. Keu. DN	-	-	-	-
c. Pinjaman dari Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	-	26 019 930	48 865 321	58 932 312

Tabel 2.5

Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur
2000

(000 Rp.)

Jenis Pengeluaran	S. Barat	S.Timur	Kupang	TTS
1	2	3	4	5
1. Belanja Pegawai	28 516 458	21 379 013	40 886 973	43 370 874
2. Belanja Barang	1 799 581	2 196 683	2 062 384	2 046 137
3. Biaya Pemeliharaan	364 079	664 255	431 265	468 370
4. Belanja Perjalanan Dinas	353 847	771 123	780 039	668 611
5. Belanja Lain-lain	924 717	1 197 472	520 406	1 687 320
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	10 000	-	-	-
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	359 745	163 080	553 748	505 680
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	771 822	307 922	1 220 893	319 856
9. Pengeluaran tidak tersangka	15 135	235 809	-	85 357
Jumlah Pengeluaran Rutin	33 115 384	26 915 357	46 455 708	49 152 205

Tabel 2.5
Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur
2000

Sambungan	(000 Rp.)			
Jenis Pengeluaran	TTU	Belu	Alor	Flotim
i	2	3	4	5
1. Belanja Pegawai	25 327 357	41 607 394	22 491 310	29 890 869
2. Belanja Barang	2 674 705	2 505 823	1 947 995	2 453 403
3. Biaya Pemeliharaan	500 307	427 924	291 273	434 953
4. Belanja Perjalanan Dinas	1 053 201	1 218 398	984 492	746 607
5. Belanja Lain-lain	300 764	1 361 095	687 918	40 800
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	-	-	57 525	15 000
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	5 490	436 020	461 405	413 147
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1 673 042	524 596	399 373	372 428
9. Pengeluaran tidak tersangka	-	-	64 989	48 227
Jumlah Pengeluaran Rutin	31 534 865	48 081 250	27 386 280	34 415 434

Tabel 2.5
Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur
2000

Sambungan	(000 Rp.)			
Jenis Pengeluaran	Sikka	Ende	Ngada	Manggarai
1	2	3	4	5
1. Belanja Pegawai	27 277 561	29 927 802	27 681 839	43 822 104
2. Belanja Barang	3 055 724	2 461 414	2 952 972	2 013 481
3. Biaya Pemeliharaan	572 090	552 023	414 476	402 236
4. Belanja Perjalanan Dinas	512 966	1 040 755	287 150	576 690
5. Belanja Lain-lain	557 018	-	154 302	1 432 161
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	-	-	-	25 000
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	448 365	111 360	415 692	728 670
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	366 134	696 640	483 143	291 604
9. Pengeluaran tidak tersangka	25 000	-	-	26 000
Jumlah Pengeluaran Rutin	32 814 858	34 789 994	32 389 580	49 317 946

Tabel 2.5
Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur
2000

Sambungan		(000 Rp.)		
Jenis Pengeluaran		Lembata	K. Kupang	Jumlah
1	2	3	4	5
1. Belanja Pegawai	-	8 992 285	20 097 816	411 269 655
2. Belanja Barang	-	1 818 690	2 272 770	29 988 992
3. Biaya Pemeliharaan	-	192 783	402 236	5 716 033
4. Belanja Perjalanan Dinas	-	415 518	133 495	9 409 403
5. Belanja Lain-lain	-	685 790	1 621 864	9 549 763
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	-	-	-	107 525
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	-	66 855	45 870	4 669 257
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	-	324 353	534 875	7 751 806
9. Pengeluaran tidak tersangka	-	228 021	90 000	818 538
Jumlah Pengeluaran Rutin	-	12 724 295	25 089 877	479 280 972

Tabel 2.5.1
Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sumba Barat
1997/1998-2000

(000 Rp.)

Jenis Pengeluaran	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Belanja Pegawai	17 974 289	21 304 894	29 365 687	28 516 458
2. Belanja Barang	1 650 641	1 331 216	1 788 529	1 799 581
3. Biaya Pemeliharaan	273 352	319 316	345 661	364 079
4. Belanja Perjalanan Dinas	627 119	410 698	540 446	353 847
5. Belanja Lain-lain	888 686	791 904	589 992	924 717
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	-	-	20 000	10 000
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	235 330	270 330	383 760	359 745
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	420 427	657 759	1 167 701	771 822
9. Pengeluaran tidak tersangka	14 101	10 000	73 145	15 135
Jumlah Pengeluaran Rutin	22 083 946	25 096 117	34 274 921	33 115 384

Tabel 2.5.2

Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sumba Timur
1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
	1	2	3	4
1. Belanja Pegawai	13 818 846	15 855 042	20 808 215	21 379 013
2. Belanja Barang	1 926 811	2 101 708	2 146 662	2 196 683
3. Biaya Pemeliharaan	382 442	455 802	450 688	664 253
4. Belanja Perjalanan Dinas	522 180	565 886	682 982	771 123
5. Belanja Lain-lain	460 725	662 576	1 175 663	1 197 472
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	390 000	100 000	-	-
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	91 463	199 050	311 520	163 080
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	179 434	240 271	446 252	307 922
9. Pengeluaran tidak tersangka	-	29 500	314 882	235 809
Jumlah Pengeluaran Rutin	17 772 901	20 209 835	26 336 864	26 915 357

Tabel 2.5.3
Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kupang
1997/1998-2000

(000 Rp.)

Jenis Pengeluaran	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
<i>l</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Belanja Pegawai	32 616 235	26 469 086	40 957 656	40 886 973
2. Belanja Barang	1 412 640	1 842 026	1 941 835	2 062 384
3. Biaya Pemeliharaan	362 442	724 372	410 535	431 265
4. Belanja Perjalanan Dinas	542 483	501 713	752 561	780 939
5. Belanja Lain-lain	737 570	1 063 294	1 644 214	620 406
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	-	-	-	-
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	70 875	63 580	551 580	563 748
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	411 979	587 647	952 959	1 220 983
9. Pengeluaran tidak tersangka	5 884	2 380 029	342 354	-
Jumlah Pengeluaran Rutin	36 160 108	33 631 747	47 553 694	46 455 708

Tabel 2.5.4
Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Timor Tengah Selatan
1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
	1	2	3	4
1. Belanja Pegawai	27 773 528	32 335 552	46 003 754	43 370 874
2. Belanja Barang	1 748 008	1 930 946	2 370 176	2 046 137
3. Biaya Pemeliharaan	558 642	703 172	719 245	468 370
4. Belanja Perjalanan Dinas	563 893	650 709	824 071	668 611
5. Belanja Lain-lain	1 521 642	1 235 726	1 742 822	1 687 320
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	-	107 000	-	-
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	27 000	363 380	578 153	505 680
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	457 784	273 903	342 445	319 856
9. Pengeluaran tidak tersangka	74 937	99 863	5 250	85 357
Jumlah Pengeluaran Rutin	32 725 435	37 700 251	52 585 916	49 152 205

Tabel 2.5.5
Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Timor Tengah Utara
1997/1998-2000

(000 Rp.)

Jenis Pengeluaran	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Belanja Pegawai	13 107 351	15 413 675	21 809 743	25 327 357
2. Belanja Barang	1 543 022	1 626 425	2 233 288	2 674 705
3. Biaya Pemeliharaan	303 104	332 067	365 548	500 307
4. Belanja Perjalanan Dinas	535 913	565 533	655 758	1 053 201
5. Belanja Lain-lain	724 027	658 185	548 599	300 764
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	150 000	-	-	-
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	19 980	55 980	47 950	5 490
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	487 846	497 807	862 617	1 673 042
9. Pengeluaran tidak tersangka	11 943	5 523	37 853	-
Jumlah Pengeluaran Rutin	16 883 186	19 155 195	26 561 356	31 534 865

Tabel 2.5.6

**Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Belu
1997/1998-2000**

(000 Rp.)

Jenis Pengeluaran	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
/	2	3	4	5
1. Belanja Pegawai	15 263 455	17 914 228	24 676 822	41 607 394
2. Belanja Barang	1 511 432	1 467 471	1 459 962	2 505 823
3. Biaya Pemeliharaan	392 930	505 642	618 720	427 924
4. Belanja Perjalanan Dinas	625 385	498 694	519 159	1 218 398
5. Belanja Lain-lain	878 184	475 757	521 727	1 361 095
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	-	-	3 000	-
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	272 348	260 172	360 822	436 020
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	490 159	365 475	479 321	524 596
9. Pengeluaran tidak tersangka	23 220	-	98 650	-
Jumlah Pengeluaran Rutin	19 457 113	21 487 439	28 738 183	48 081 250

Tabel 2.5.7
Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Alor
1997/1998-2000

(000 Rp.)

Jenis Pengeluaran	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Belanja Pegawai	14 192 288	16 668 195	23 447 859	22 491 310
2. Belanja Barang	1 605 564	1 632 381	1 815 784	1 947 995
3. Biaya Pemeliharaan	266 833	175 800	418 254	291 273
4. Belanja Perjalanan Dinas	551 686	592 926	656 000	984 492
5. Belanja Lain-lain	792 582	705 663	860 972	687 918
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	-	123 194	75 000	57 525
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	178 166	202 330	277 345	461 405
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	282 995	318 935	433 471	399 373
9. Pengeluaran tidak tersangka	54 092	27 880	106 516	64 989
Jumlah Pengeluaran Rutin	17 924 206	20 447 303	28 091 201	27 386 280

Tabel 2.5.8
Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Flores Timur
1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
	1	2	3	4
1. Belanja Pegawai	24 319 445	28 374 569	39 890 811	29 890 869
2. Belanja Barang	1 651 113	1 703 002	1 753 751	2 453 403
3. Biaya Pemeliharaan	263 475	249 820	338 050	434 953
4. Belanja Perjalanan Dinas	625 610	551 972	591 308	746 607
5. Belanja Lain-lain	1 106 327	1 018 998	1 294 363	40 800
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	-	12 500	-	15 000
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	436 376	498 953	600 268	413 147
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	285 821	375 097	365 965	372 428
9. Pengeluaran tidak tersangka	572 534	571 102	457 681	48 227
Jumlah Pengeluaran Rutin	29 260 701	33 356 013	45 292 197	34 415 434

Tabel 2.5.9
Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sikka
1997/1998-2000

(000 Rp.)

Jenis Pengeluaran	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Belanja Pegawai	17 650 919	20 904 722	28 525 444	27 277 561
2. Belanja Barang	2 242 075	2 139 004	2 841 008	3 055 724
3. Biaya Pemeliharaan	410 168	420 834	557 809	572 090
4. Belanja Perjalanan Dinas	547 429	458 522	546 856	512 966
5. Belanja Lain-lain	759 794	653 142	799 916	557 018
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	19 650	583 595	-	-
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	227 385	433 455	493 950	448 365
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	253 456	207 095	441 082	366 134
9. Pengeluaran tidak tersangka	19 5400	-	25 000	25 000
Jumlah Pengeluaran Rutin	22 130 376	25 800 369	34 231 065	32 814 858

Tabel 2.5.10
Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ende
1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
1	2	3	4	5
1. Belanja Pegawai	19 468 396	22 694 193	30 799 788	29 927 802
2. Belanja Barang	1 575 890	1 723 778	2 061 327	2 461 414
3. Biaya Pemeliharaan	353 079	425 602	578 977	552 023
4. Belanja Perjalanan Dinas	466 921	429 788	670 772	1 040 755
5. Belanja Lain-lain	606 402	746 407	906 679	-
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	50 000	-	-	-
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	38 525	94 940	180 400	111 360
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	422,979	371 822	701 971	696 640
9. Pengeluaran tidak tersangka	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Rutin	22 982 192	26 486 530	35 899 914	34 789 994

Tabel 2.5.11
 Realisasi Pengeluaran Rutin
 Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ngada
 1997/1998-2000

(000 Rp.)

Jenis Pengeluaran	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
I	2	3	4	5
1. Belanja Pegawai	17 980 884	20 811 091	30 156 714	27 681 839
2. Belanja Barang	1 232 274	1 542 269	2 108 829	2 952 972
3. Biaya Pemeliharaan	213 368	246 756	416 935	414 476
4. Belanja Perjalanan Dinas	318 606	297 776	499 989	287 150
5. Belanja Lain-lain	750 562	757 134	587 018	154 302
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	-	-	-	-
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	317 620	337 355	415 959	415 692
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	499 475	538 448	718 959	483 143
9. Pengeluaran tidak tersangka	22 193	4 900	18 914	-
Jumlah Pengeluaran Rutin	21 334 982	24 535 729	34 923 317	32 389 580

Tabel 2.5.12
 Realisasi Pengeluaran Rutin
 Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai
 1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Belanja Pegawai	28 302 816	33 705 718	46 099 051	43 822 104
2. Belanja Barang	1 961 009	1 633 094	3 159 366	2 013 481
3. Biaya Pemeliharaan	253 244	247 336	650 658	402 236
4. Belanja Perjalanan Dinas	730 289	542 521	812 702	576 690
5. Belanja Lain-lain	1 392 819	1 119 408	1 432 627	1 432 161
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	10 000	20 000	10 000	25 000
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	402 435	484 830	679 260	728 670
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	506 215	513 358	738 471	291 604
9. Pengeluaran tidak tersangka	33 240	48 570	53 658	26 000
Jumlah Pengeluaran Rutin	33 592 067	38 314 835	53 635 793	49 317 946

Tabel 2.5.13
Realisasi Pengeluaran Rutin
Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Kupang
1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	1997/1998	1998/1999	1999/2000	(000 Rp.)
				2000
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Belanja Pegawai	-	12 987 945	19 551 523	20 097 816
2. Belanja Barang	-	1 972 923	2 446 643	2 272 770
3. Biaya Pemeliharaan	-	276 263	454 042	402 236
4. Belanja Perjalanan Dinas	-	220 357	267 426	133 495
5. Belanja Lain-lain	-	1 020 615	1 540 619	1 621 864
6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	-	199 148	145 082	-
7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	-	46 800	60 620	45 870
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	-	394 690	464 750	534 875
9. Pengeluaran tidak tersangka	-	6 500	288 402	90 000
Jumlah Pengeluaran Rutin	-	17 125 241	25 219 107	25 089 877

Tabel 2.6
Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur
2000

(000 Rp.)

Jenis Pengeluaran	S. Barat	S. Timur	Kupang	TTS
I	2	3	4	5
1. Industri	50 000	-	880 952	235 000
2. Pertanian dan Kehutanan	1 105 548	1 715 000	10 177 477	3 069 102
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	618 261	139 990	829 775	2 404 408
4. Tenaga Kerja	262 800	-	-	50 000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	314 205	189 298	1 417 104	1 689 513
6. Transportasi	2 165 507	1 788 322	5 020 281	4 307 847
7. Pertambangan dan Energi	-	-	-	294 232
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	58 502	87 988	237 966	146 040
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	2 805 973	9 464 554	765 328	961 679
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	982 784	965 643	885 490	969 350
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga	1 164 230	1 390 210	1 179 477	2 914 283
12. Kependudukan dan KB	40 000	58 249	-	-
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja	754 075	492 042	1 472 111	526 486
14. Perumahan dan Pemukiman	1 387 565	3 329 701	8 502 299	4 431 823
15. Agama	-	24 500	12 497	50 000
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	332 025	186 252	284 310	219 970
17. Hukum	89 120	50 000	244 688	58 900
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	2 124 476	1 260 071	3 803 071	1 502 669
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	40 870	239 956	89 570	123 678
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	-	55 483	309 549	100 000
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan	-	54 171	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	14 295 941	21 491 430	36 111 945	24 054 985

Tabel 2.6
 Realisasi Pengeluaran Pembangunan
 Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur
 2000

Sambungan	(000 Rp.)			
Jenis Pengeluaran	TTU	Belu	Alor	Flotim
1	2	3	4	5
1. Industri	55 000	-	53 768	94 265
2. Pertanian dan Kehutanan	2 466 221	5 146 480	1 014 903	1 683 900
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	209 394	932 615	216 707	84 994
4. Tenaga Kerja	-	-	-	49 654
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	233 322	867 554	410 350	315 000
6. Transportasi	3 196 477	3 849 663	1 422 024	2 048 031
7. Pertambangan dan Energi	7 269	-	-	-
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	116 750	388 045	62 920	80 000
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	5 005 651	6 146 297	4 801 514	740 669
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	1 374 423	1 192 820	1 588 662	819 982
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga	1 079 803	1 586 124	1 329 483	1 444 105
12. Kependudukan dan KB	-	20 000	-	109 244
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja	1 176 459	351 371	1 199 056	1 087 818
14. Perumahan dan Pemukiman	11 665 751	312 000	421 473	1 200 836
15. Agama	-	-	27 750	85 000
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	76 910	240 445	-	60 964
17. Hukum	208 278	100 000	-	130 000
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	2 449 281	1 565 305	21 736	2 331 115
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	150 500	67 845	25 670	75 524
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	84 080	715 240	-	107 018
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahans	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	29 555 569	23 481 804	12 596 016	12 548 119

Tabel 2.6

Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur Tenggara Timur
2000

Sambungan	(000 Rp.)			
Jenis Pengeluaran	Sikka	Ende	Ngada	Manggarai
1	2	3	4	5
1. Industri	68 600	75 000	58 000	35 000
2. Pertanian dan Kehutanan	668 831	1 361 692	1 325 428	1 065 218
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	440 482	499 936	100 000	98 304
4. Tenaga Kerja	-	-	-	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	1 305 499	250 000	246 213	244 823
6. Transportasi	3 163 603	2 884 816	1 892 806	3 217 782
7. Pertambangan dan Energi	-	-	-	-
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	150 576	100 000	91 000	109 476
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	1 297 039	244 653	361 433	3 589 243
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	1 489 496	315 000	410 338	966 323
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga	2 844 697	1 117 796	1 349 596	1 195 434
12. Kependudukan dan KB	64 000	-	-	48 870
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja	683 028	207 482	922 450	611 522
14. Perumahan dan Pemukiman	1 890 677	851 856	6 965 954	1 126 850
15. Agama	125 000	44 170	-	-
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	110 000	75 000	217 870	496 021
17. Hukum	29 400	25 000	85 000	129 940
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	1 272 943	860 938	1 377 303	1 084 433
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	49 030	25 000	82 417	85 760
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	93 100	-	20 600	49 920
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	15 746 001	11 138 339	15 506 408	14 154 919

Tabel 2.6

**Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur Tenggara Timur
2000**

Sambungan		(000 Rp.)		
Jenis Pengeluaran		Lembata	K. Kupang	Jumlah
i	2	3	4	5
1. Industri	-	18 557	59 850	1 683 992
2. Pertanian dan Kehutanan	-	1 263 638	301 097	32 364 535
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	-	-	29 000	6 603 866
4. Tenaga Kerja	-	-	-	362 454
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	-	204 988	3 258 169	10 946 043
6. Transportasi	-	4 730 000	6 707 931	46 395 090
7. Pertambangan dan Energi	-	40 000	450 000	791 501
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	-	-	74 548	1 703 811
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	-	172 095	3 166 938	41 423 066
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	-	249 569	156 060	12 365 940
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga	-	1 249 540	2 022 696	21 867 474
12. Kependudukan dan KB	-	250 000	69 001	659 364
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja	-	172 000	943 032	10 598 932
14. Perumahan dan Pemukiman	-	412 673	10 625 937	56 834 395
15. Agama	-	33 440	100 000	502 357
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	277 469	-	2 577 236
17. Hukum	-	45 000	25 000	1 220 326
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	-	683 981	1 529 878	21 867 200
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	-	333 500	212 300	1 601 620
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	-	25 000	69 680	1 629 670
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan	-	80 000	-	134 171
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	-	13 950 450	29 801 117	274 433 943

Tabel 2.6.1

Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sumba Barat
1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
1	2	3	4	5
1. Industri	-	15 000	350 000	50 000
2. Pertanian dan Kehutanan	114 710	509 612	2 231 649	1 105 548
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	9 500	20 000	629 799	618 261
4. Tenaga Kerja	-	-	-	262 800
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	157 600	309 766	299 498	314 205
6. Transportasi	5 668 637	4 543 475	3 416 682	2 165 507
7. Pertambangan dan Energi	-	-	-	-
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	25 000	49 900	99 419	58 502
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	529 719	419 084	1 117 987	2 805 973
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	1 066 380	1 089 700	2 525 321	982 784
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga	2 313 851	1 896 560	2 306 600	1 164 230
12. Kependudukan dan KB	100 000	-	35 000	40 000
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja	3 924 358	624 383	243 974	754 075
14. Perumahan dan Pemukiman	199 750	950 984	1 046 058	1 387 565
15. Agama	-	-	-	-
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	238 912	402 505	332 025
17. Hukum	35 000	40 000	60 000	89 120
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	1 157 607	1 065 216	1 607 719	2 124 476
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	30 000	30 000	40 000	40 870
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	57 000	-	-	-
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan	70 000	184 492	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	16 705 929	11 987 084	16 412 211	14 295 941

Tabel 2.6.2
Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sumba Timur
1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
1	2	3	4	5
1. <i>Industri</i>	-	-	-	-
2. <i>Pertanian dan Kehutanan</i>	114 710	309 428	840 965	1 715 000
3. <i>Sumber Daya Air dan Irigasi</i>	9 500	-	25 000	139 990
4. <i>Tenaga Kerja</i>	-	-	-	-
5. <i>Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi</i>	157 600	53 000	136 023	189 298
6. <i>Transportasi</i>	5 668 637	3 045 250	1 906 528	1 788 322
7. <i>Pertambangan dan Energi</i>	-	27 413	480 500	-
8. <i>Pariwisata dan Telekomunikasi</i>	6 283	14 045	95 364	87 988
9. <i>Pembangunan Daerah dan Pemukiman</i>	297 268	392 242	850 474	9 464 554
10. <i>Lingkungan Hidup & Tata Ruang</i>	775 895	528 265	1 362 427	965 643
11. <i>Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga</i>	1 906 620	1 241 733	763 336	1 390 210
12. <i>Kependudukan dan KB</i>	-	-	68 200	58 249
13. <i>Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja</i>	413 923	388 588	330 602	492 042
14. <i>Perumahan dan Pemukiman</i>	653 541	436 560	1 081 978	3 329 701
15. <i>Agama</i>	12 000	11 750	-	24 500
16. <i>Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</i>	68 500	20 540	228 955	186 252
17. <i>Hukum</i>	7 600	5 000	33 976	50 000
18. <i>Aparatur Pemerintah dan Pengawasan</i>	294 743	397 216	211 681	1 260 071
19. <i>Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa</i>	90 350	64 217	89 638	239 956
20. <i>Keamanan dan Ketertiban Umum</i>	163 200	-	60 000	55 483
21. <i>Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan</i>	50 000	-	-	54 171
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	10 690 368	6 835 247	8 565 647	21 491 430

Tabel 2.6.3

**Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kupang
1997/1998-2000**

(000 Rp.)

Jenis Pengeluaran	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
/	2	3	4	5
1. Industri	18 781	67 784	139 583	880 952
2. Peranian dan Kehutanan	961 328	602 311	2 409 904	10 177 477
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	99 485	63 943	422 481	829 775
4. Tenaga Kerja	9 485	-	-	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	152 574	442 994	629 154	1 417 104
6. Transportasi	6 545 185	5 159 342	3 827 520	5 020 281
7. Pertambangan dan Energi	24 973	-	-	-
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	19 125	84 845	141 487	237 966
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	3 310 234	1 545 490	11 973 660	765 328
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	882 709	913 082	2 410 237	885 490
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga	4 397 283	1 819 509	6 198 878	1 179 477
12. Kependudukan dan KB	-	-	-	-
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja	2 270 862	568 498	1 925 460	1 472 111
14. Perumahan dan Pemukiman	-	180 425	1 074 746	8 502 299
15. Agama	-	-	14 901	12 497
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	42 890	79 988	50 000	284 310
17. Hukum	59 111	44 774	106 696	244 688
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	2 853 422	1 173 512	2 562 370	3 803 071
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	158 662	126 861	459 252	89 570
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	150 693	181 220	176 032	309 549
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan	175 000	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	22 131 725	13 054 578	34 522 361	36 111 945

Tabel 2.6.4
Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Timor Tengah Selatan
1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Industri	104 350	60 000	475 000	235 000
2. Pertanian dan Kehutanan	615 296	164 948	1 604 807	3 069 102
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	466 354	271 007	1 904 800	2 404 408
4. Tenaga Kerja	17 500	40 000	40 000	50 000
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	371 886	379 340	608 028	1 689 513
6. Transportasi	5 091 626	2 375 308	5 692 924	4 307 847
7. Pertambangan dan Energi	77 700	60 000	218 794	294 232
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	86 623	49 998	75 000	146 040
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	4 902 592	600 094	1 083 968	961 679
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	730 997	918 718	2 541 150	969 350
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga	-	-	-	-
12. Kependudukan dan KB	30 000	-	-	-
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja	1 285 644	511 155	608 319	526 486
14. Perumahan dan Pemukiman	-	-	379 998	4 431 823
15. Agama	30 000	32 500	60 000	50 000
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	730 539	330 482	647 970	219 970
17. Hukum	18 364	35 000	50 000	58 900
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	619 583	726 288	1 126 708	1 502 669
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	138 741	78 234	25 000	123 678
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	-	20 000	125 000	100 000
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan	15 000	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	20 282 788	8 046 416	18 971 879	24 054 985

Tabel 2.6.5
Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Timor Tengah Utara
1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
1	2	3	4	5
1. <i>Industri</i>	20 000	-	-	55 000
2. <i>Pertanian dan Kehutanan</i>	413 143	295 439	2 210 794	2 466 221
3. <i>Sumber Daya Air dan Irigasi</i>	1 831 890	34 979	123 184	209 394
4. <i>Tenaga Kerja</i>	-	-	-	-
5. <i>Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi</i>	371 403	88 040	365 459	233 322
6. <i>Transportasi</i>	5 784 919	4 086 624	1 173 814	3 196 477
7. <i>Pertambangan dan Energi</i>	-	-	60 000	7 269
8. <i>Pariwisata dan Telekomunikasi</i>	56 489	183 282	194 974	116 750
9. <i>Pembangunan Daerah dan Pemukiman</i>	260 411	359 097	387 653	5 005 651
10. <i>Lingkungan Hidup & Tata Ruang</i>	923 753	782 782	312 174	1 374 423
11. <i>Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga</i>	2 857 943	2 437 135	202 151	1 079 803
12. <i>Kependudukan dan KB</i>	-	-	-	-
13. <i>Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja</i>	2 683 131	466 115	864 856	1 176 459
14. <i>Perumahan dan Pemukiman</i>	-	-	418 195	11 665 751
15. <i>Agama</i>	-	-	-	-
16. <i>Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</i>	100 000	23 950	155 000	76 910
17. <i>Hukum</i>	11 634	-	105 000	208 278
18. <i>Aparatur Pemerintah dan Pengawasan</i>	885 342	859 666	1 834 256	2 449 281
19. <i>Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa</i>	59 500	28 500	200 500	150 500
20. <i>Keamanan dan Ketertiban Umum</i>	-	64 568	162 430	84 080
21. <i>Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan</i>	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	16 259 558	9 711 176	8 770 440	29 555 569

Tabel 2.6.6

Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Belu
1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
I	2	3	4	5
1. Industri	-	-	-	-
2. Pertanian dan Kehutanan	242 825	64 628	574 005	5 146 480
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	634 760	55 000	1 453 288	932 615
4. Tenaga Kerja	-	-	-	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	144 682	158 323	275 650	867 554
6. Transportasi	5 998 185	4 718 177	2 008 258	3 849 663
7. Pertambangan dan Energi	-	-	-	-
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	93 814	64 640	261 355	388 045
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	928 044	646 782	5 015 451	6 146 297
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	594 726	785 258	1 572 356	1 192 820
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga	4 287 405	1 980 819	4 016 096	1 586 124
12. Kependudukan dan KB	-	-	-	20 000
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja	616 277	356 722	575 622	351 371
14. Perumahan dan Pemukiman	-	-	250 000	312 000
15. Agama	-	-	-	-
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	480 166	170 856	318 927	240 445
17. Hukum	10 666	6 750	45 000	100 000
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	1 126 622	628 987	2 279 673	1 565 305
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	23 625	7 086	85 000	67 845
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	86 780	27 900	77 200	715 240
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan	1 076 524	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	16 345 101	9 671 928	18 807 881	23 481 804

Tabel 2.6.7

Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Alor
1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
1	2	3	4	5
1. Industri	25 000	23 640	-	53 768
2. Pertanian dan Kehutanan	321 973	278 731	1 340 174	1 014 903
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	40 000	126 550	147 595	216 707
4. Tenaga Kerja	-	-	-	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	105 000	62 910	190 350	410 350
6. Transportasi	3 956 609	3 285 740	4 810 575	1 422 024
7. Pertambangan dan Energi	-	-	-	-
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	30 000	10 000	82 000	62 920
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	926 509	276 347	529 951	4 801 514
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	555 269	506 917	1 913 747	1 588 662
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga	3 062 855	1 561 153	2 273 133	1 329 483
12. Kependudukan dan KB	-	-	40 000	-
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja	1 026 916	328 294	986 199	1 199 056
14. Perumahan dan Pemukiman	-	24 600	784 193	421 473
15. Agama	56 000	10 000	25 000	27 750
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	49 525	69 925	75 000	-
17. Hukum	12 490	-	25 000	-
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	423 338	294 062	1 203 804	21 736
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	171 840	40 158	103 438	25 670
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	15 000	45 000	159 689	-
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan	50 000	60 000	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	10 828 324	7 004 024	14 689 848	12 596 016

Tabel 2.6.8
Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Flores Timur
1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
1	2	3	4	5
1. Industri	34 974	-	68 345	94 265
2. Pertanian dan Kehutanan	503 525	134 055	856 117	1 683 900
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	137 074	69 348	149 775	84 994
4. Tenaga Kerja	-	-	-	49 654
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	176 156	150 000	599 775	315 000
6. Transportasi	7 358 511	3 144 401	946 180	2 048 031
7. Pertambangan dan Energi	-	-	25 000	-
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	75 804	49 000	276 931	80 000
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	700 300	686 192	423 611	740 669
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	515 273	577 604	2 143 891	819 982
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga	-	-	-	-
12. Kependudukan dan KB	4 298 496	1 678 471	162 419	1 444 105
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja	101 600	-	369 141	109 244
14. Perumahan dan Pemukiman	2 613 961	364 094	310 439	1 087 818
15. Agama	237 850	-	221 132	1 200 836
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	9 520	26 000	45 000	85 000
17. Hukum	-	514 188	252 935	60 964
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	36 885	26 447	107 748	130 000
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	443 037	594 558	1 720 934	2 331 115
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	95 810	127 500	184 000	75 524
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahans	-	-	195 000	107 018
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	313 855	-	-	-
	17 652 631	8 141 858	9 058 373	12 548 119

Tabel 2.6.9

Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sikka
1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
	2	3	4	5
1. Industri	29 700	16 355	35 000	68 600
2. Pertanian dan Kehutanan	337 377	137 218	523 547	668 831
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	118 900	86 556	619 993	440 482
4. Tenaga Kerja	-	-	-	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	644 822	34 240	65 263	1 305 499
6. Transportasi	4 843 52	3 644 834	2 866 451	3 163 603
7. Pertambangan dan Energi	19 700	-	28 500	-
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	88 301	56 821	173 019	150 576
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	1 731 609	399 848	6 240 705	1 297 039
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	742 310	773 685	2 765 003	1 489 496
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga	-	-	-	-
12. Kependudukan dan KB	4 443 862	1 546 239	2 729 550	2 844 697
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja	239 18	84 700	75 000	64 000
14. Perumahan dan Pemukiman	1 874 960	508 730	724 834	683 028
15. Agama	-	-	-	1 890 677
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	25 000	-	20 000	125 000
17. Hukum	90 000	50 000	79 115	110 000
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	12 500	21 500	40 000	29 400
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	959 556	1 238 088	937 940	1 272 943
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	44 683	30 000	75 000	49 030
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan	55 000	12 500	349 000	93 100
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	225 000	-	-	-
	16 666 950	8 641 314	18 347 920	15 746 001

Tabel 2.6.10

Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ende
1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
	2	3	4	5
1. Industri	-	-	79 592	75 000
2. Pertanian dan Kehutanan	269 908	158 950	1 060 019	1 361 692
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	-	-	49 975	499 936
4. Tenaga Kerja	-	-	-	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	314 000	140 542	375 555	250 000
6. Transportasi	4 224 979	3 549 973	1 441 184	2 884 816
7. Pertambangan dan Energi	-	-	-	-
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	-	25 000	164 965	100 000
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	209 180	326 446	466 465	244 653
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	600 360	620 536	1 194 747	315 000
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga	1 511 654	1 480 000	993 588	1 117 796
12. Kependudukan dan KB	10 000	-	-	-
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja	322 192	394 630	598 808	207 482
14. Perumahan dan Pemukiman	699 222	-	550 873	851 856
15. Agama	-	-	99 221	44 170
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	120 010	50 620	25 000	75 000
17. Hukum	19 775	30 000	100 000	25 000
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	865 252	1 016 253	1 445 078	860 938
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	145 000	45 000	224 820	25 000
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	39 000	25 000	75 000	-
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	9 350 532	7 862 950	8 944 890	11 138 339

Tabel 2.6.11

**Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ngada
1997/1998-2000**

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)				
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000	
	1	2	3	4	5
1. Industri		74 500	130 000	50 000	58 000
2. Pertanian dan Kehutanan		1 287 574	882 108	2 499 184	1 325 428
3. Sumber Daya Air dan Irigasi		-	56 200	58 716	100 000
4. Tenaga Kerja		-	-	-	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi		158 542	347 286	753 617	246 213
6. Transportasi		5 820 983	6 057 133	454 987	1 892 806
7. Pertambangan dan Energi		-	-	-	-
8. Pariwisata dan Telekomunikasi		84 716	236 363	204 898	91 000
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman		298 193	194 199	472 377	361 433
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang		502 483	219 972	207 165	410 338
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga		-	-	-	-
12. Kependudukan dan KB		3 776 959	1 735 942	143 309	1 349 596
13. Kesehatan, Kesajahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja		496 921	496 083	835 654	922 450
14. Perumahan dan Pemukiman		2 337 422	212 874	998 584	6 965 954
15. Agama		30 000	-	-	-
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		99 563	65 000	123 988	217 870
17. Hukum		16 416	27 800	38 559	85 000
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan		716 681	352 890	949 752	1 377 303
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa		22 000	29 695	64 723	82 417
20. Keamanan dan Ketertiban Umum		25 128	67 614	91 637	20 600
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan		150 000	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	15 898 081	11 111 159	7 947 150	15 506 408	

Tabel 2.6.12

**Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai
1997/1998-2000**

Jenis Pengeluaran	(000 Rp.)			
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000
I	2	3	4	5
1. Industri	26 734	25 000	344 932	35 000
2. Pertanian dan Kehutanan	807 266	197 448	1 292 642	1 065 218
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	134 724	70 000	293 237	98 304
4. Tenaga Kerja	-	-	-	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	94 904	157 322	417 272	244 823
6. Transportasi	7 082 142	5 409 975	887 009	3 217 782
7. Pertambangan dan Energi	-	59 883	24 964	-
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	103 775	55 000	97 950	109 476
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	1 899 452	694 643	1 974 839	3 589 243
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	877 497	814 032	2 184 908	966 323
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME. Pemuda & Olahraga	-	-	-	-
12. Kependudukan dan KB	3 233 850	1 990 818	514 381	1 195 434
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial. Peranan Wanita, Anak & Remaja	16 377	15 000	23 895	48 870
14. Perumahan dan Pemukiman	7 822 506	785 007	919 929	611 522
15. Agama	301 577	976 256	909 897	1 126 850
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	13 232	20 000	-	-
17. Hukum	221 803	81 995	253 978	496 021
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	41 250	48 000	47 660	129 940
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	640 228	795 200	834 981	1 084 433
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	114 338	48 102	99 545	85 760
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan	-	29 999	50 000	49 920
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	150 000	-	-	-
	23 581 655	12 273 680	11 172 019	14 154 919

Tabel 2.6.13

Realisasi Pengeluaran Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Kupang
1997/1998-2000

Jenis Pengeluaran	1997/1998	1998/1999	1999/2000	(000 Rp.)	
				2000	5
1. Industri	-	74 000	77 875	59 850	
2. Pertanian dan Kehutanan	-	181 737	517 285	301 097	
3. Sumber Daya Air dan Irigasi	-	98 671	99 091	29 000	
4. Tenaga Kerja	-	-	-	-	
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	-	93 520	1 387 111	3 258 169	
6. Transportasi	-	1 596 916	3 169 010	6 707 931	
7. Pertambangan dan Energi	-	260 679	323 260	450 000	
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	-	47 379	63 992	74 548	
9. Pembangunan Daerah dan Pemukiman	-	489 858	200 850	3 166 938	
10. Lingkungan Hidup & Tata Ruang	-	197 071	496 086	156 060	
11. Pendidikan, Kebud. Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda & Olahraga	-	3 220 406	3 317 437	2 022 696	
12. Kependudukan dan KB	-	9 434	9 710	69 001	
13. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Remaja	-	327 804	323 577	943 032	
14. Perumahan dan Pemukiman	-	229 749	10 527 000	10 625 937	
15. Agama	-	26 694	56 681	100 000	
16. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	-	-	-	
17. Hukum	-	6 799	34 780	25 000	
18. Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	-	1 602 677	1 235 814	1 529 878	
19. Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	-	42 939	144 328	212 300	
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	-	15 636	49 405	69 680	
21. Subsidi Pembangunan kpd Daerah Bawahan	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran Pembangunan	-	8 521 968	22 033 292	29 801 117	

https://nrt.bps.go.id

BPS

Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. R. Suprapto No. 5, Kupang 85111
Telp. (0380) 826289, 821755, Fax. (0380) 833124
e-mail : bps5300@kupang.wasantara.net.id